



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAULIDI
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 817505

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 925.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 805.000.000
2. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah Seluas 279 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 107.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TARUNA CL MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, HONDA/NC11B3 A/T SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA/C1C02N16M2, A/T SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU TARUNA CL MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000
5. MOTOR, HONDA/NC11B3 A/T SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
6. MOTOR, HONDA/C1C02N16M2, A/T SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
7. MOTOR, YAMAHA/B6H-F A/T SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.334.761
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.042.334.761
III. HUTANG	Rp.	175.414.723
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	866.920.038

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.